

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN PESISIR DAN LAUT DI DESA TANJUNG SELOKA
KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
KABUPATEN KOTABARU KALIMANTAN SELATAN**

***The Effectiveness of The Implementation of Coastal and Sea Environmental Management
Policies in Tanjung Seloka Village South Island Kotabaru District South Kalimantan***

Abdul Hadi¹⁾, Mukhyar Amani²⁾, Basuki Rahman³⁾

¹⁾ Universitas Terbuka, Banjarmasin/e-mail: ahadi@ecampus.ut.ac.id

²⁾ Universitas Terbuka, Banjarmasin/e-mail: mukhyar@ecampus.ut.ac.id

³⁾ Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat/e-mail: basuki_rahman24@ymail.com

Abstract

Tanjung Seloka Village is one of many villages located in the coastal area of Kotabaru Regency, South Kalimantan. Because it is located on the coast, many people there work or have a livelihood in the field of marine products, from fishermen, collectors, and retailers, to fish traders in the market. In addition to being very far from the city center, this village is also not easily accessible due to road conditions that are not fully supported. This situation then affects many aspects of life in Tanjung Seloka Village, both educational, economic, social, and the environment in general. One of the problems that occur in Tanjung Seloka Village is the lack of public insight regarding applicable government regulations related to the management of coastal and marine areas, which may be due to problems of distance, access, and so that the government is lacking in providing socialization to the community.

Keywords: coastal; effective; policy; sea; Tanjung Seloka

PENDAHULUAN

Lingkungan pesisir dan laut menduduki peran penting dalam suatu ekosistem, dimana Indonesia sendiri adalah negara maritim dengan barisan kepulauan yang hampir seluruh wilayahnya memiliki wilayah pesisir dan laut. Panjang pantai Indonesia adalah 81.000 km dan hampir seluruhnya berupa pantai produktif. Dengan luas wilayah Indonesia yang tercatat 7,1 juta km² yang didominasi oleh wilayah laut seluas ± 5,4 juta km². Kondisi demikian berpengaruh terhadap melimpahnya sumberdaya kelautan, baik perikanan maupun yang lainnya, termasuk juga sumberdaya yang dapat dihasilkan dari wilayah pesisirnya.

Indonesia yang secara geografis berada tepat di garis katulistiwa, dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan hasil laut dan sumberdaya alam pada umumnya yang mampu bertahan lama bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia memiliki sumberdaya alam yang sangat besar, sehingga Indonesia sering disebut “Raksasa yang sedang tidur (*the sleeping giant*)”. Sumberdaya kelautan di Indonesia tidak bisa dikesampingkan dalam upaya pembangunan kesejahteraan bangsa, sehingga seyogianya sumberdaya kelautan ini mendapat perhatian penuh dari semua kalangan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatannya secara bijak dan berwawasan lingkungan. Menurut data riset Komisi Stok Ikan Nasional, diperkirakan

stok sumberdaya perikanan nasional sebesar 6,4 juta ton per tahun dan ini hanya berupa estimasi kasar karena memungkinkan masih banyak tambahan dari ikan perairan daratan (*minland water fisheries*). Demikian juga dengan wilayah pesisir yang memiliki banyak potensi ekonomi, seperti cagar wisata, sarana presentasi budaya lokal, maupun yang lainnya.

Dengan potensi yang demikian besarnya, maka pengelolaan berkelanjutan sangat penting dinaungi oleh kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran baik dari perumusan maupun implementasinya. Keterlibatan semua kalangan juga penting untuk mendukung efektifnya upaya pengelolaan lingkungan pesisir dan laut di Indonesia.

Tanjung Seloka adalah sebuah desa di Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang secara geografis terletak di sebelah Selatan Kabupaten Kotabaru dan salah satu dari banyak desa yang berada di ujung daratan Pulau Laut. Letaknya yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Kotabaru, terlebih dari pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, membuat desa ini jarang menjadi topik perhatian dalam isu penelitian lingkungan. Hal demikian disebabkan juga oleh akses menuju ke desa Tanjung Seloka yang tidak mudah, selain karena jarak yang jauh, juga kondisi jalan yang tidak memadai. Sehingga para peneliti, baik dari universitas maupun yang lain jarang tertarik melakukan penelitian di sana dan hal demikian menyebabkan sedikitnya informasi yang dapat menjadi referensi atau acuan untuk pengembangan perekonomian masyarakat di sana, khususnya dari sektor lingkungan pesisir dan sumberdaya kelautan. Padahal meski demikian semua wilayah di Indonesia berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama. Terlebih dalam konteks penelitian oleh akademisi, tentu penelitian yang dilakukan di desa Tanjung Seloka ini akan semakin menambah kekayaan khazanah keilmuan di Provinsi Kalimantan Selatan,

khususnya di bidang lingkungan dan sumberdaya alam.

Secara administrasi, desa Tanjung Seloka terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Tanjung Seloka Utara dan Tanjung Seloka Selatan. Desa ini diduduki oleh masyarakat dengan beragam suku, dapat dijumpai suku Mandar, Bugis, Banjar, bahkan Jawa. Karena letaknya yang berdekatan dengan laut, maka sejak dahulu mata pencaharian masyarakat di Desa Tanjung Seloka adalah nelayan, meskipun ada juga yang memanfaatkan lahan dengan berkebun dan bertani dan sebagian kecil ada masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Namun dewasa ini masyarakat merasakan penurunan hasil perikanan yang jauh. Tidak lain halnya dengan pergeseran budaya masyarakat pesisir yang dirasakan sudah banyak perubahan, tentu ini menjadi indikasi adanya pengaruh yang saling terhubung dengan menurunnya hasil sumberdaya laut, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat desa Tanjung Seloka.

Berangkat dari uraian di atas, penulis melakukan suatu kajian atau penelitian terhadap efektivitas penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah baik dari skala nasional, daerah, maupun di desa Tanjung Seloka sendiri terkait pengelolaan lingkungan pesisir dan sumberdaya kelautan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu sebuah studi yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Metode kualitatif tidak hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Namun sebagai penegasan pada kesimpulannya akan disandingkan juga dengan metode kuantitatif pada tahap uji hipotesis.

Penelitian ini dilakukan dengan proses berkesinambungan, sehingga pengumpulan data dan pengolahan data dapat dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Pada saat data dikumpulkan, diupayakan data dapat diolah secara bersamaan. Usai pengolahan data, tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Seluruh data yang didapatkan dari kegiatan kemudian diklarifikasi, dipilah sesuai kelompoknya. Kemudian penulis menentukan data-data yang dapat digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan dilaksanakan pada minggu ke – 1 Juni hingga minggu ke – 2 Juni 2022 untuk tahap melengkapi data sekunder dengan mengunjungi instansi-instansi terkait, baik secara langsung maupun online di website resmi. Minggu ke – 3 Juni hingga minggu ke – 3 Juli 2022 dilakukan tahap observasi dengan mengunjungi langsung ke lokasi pengamatan, yaitu Desa Tanjung Seloka, dengan melakukan wawancara langsung terhadap beberapa nelayan, pelaku ekonomi pesisir dan masyarakat terkait yang berkegiatan di lingkungan pesisir dan laut Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Lokasi pengamatan ditentukan secara purposif dan berfokus pada sepanjang wilayah pesisir di Desa Tanjung Seloka dan dibagi pada 3 wilayah dengan asumsi jarak yang merata, yang kemudian diberikan kode wilayah A, wilayah B dan wilayah C. Pada wilayah A yaitu di sekitar wilayah pesisir yang berdekatan dengan pasar Nyiur Melambai yang merupakan kawasan pasar utama Desa Tanjung Seloka dan lokasi perdagangan hasil laut, wilayah B merupakan kawasan yang bersambung dari wilayah A hingga kawasan pasar ikan Pejala yang merupakan pusat perdagangan ikan bahari di Desa Tanjung Seloka dan wilayah C merupakan kawasan selajutnya dari pasar Pejala hingga wilayah pesisir

Tanjung Keramat yang merupakan kawasan wisata baru di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari ketiga wilayah pengamatan ini masing-masing diambil 5 orang sampel masyarakat yang keterangannya dianggap dapat mewakili kondisi di masing-masing wilayah pengamatan tersebut. Beberapa pertanyaan diajukan kepada masing-masing orang yang menjadi sampel untuk mengetahui kondisi di masing-masing wilayah pengamatan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ialah seputar pengetahuan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan hubungannya pada peningkatan ekonomi masyarakat dan dampak yang dirasakan dari implementasi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Minggu ke – 4 Juli 2022 dilakukan kuisioner untuk mendapatkan data primer yang lebih akurat. Dilakukan pula dokumentasi saat pengamatan. Analisis data hingga penyusunan laporan diselesaikan dari minggu ke -1 hingga minggu ke - 4 Agustus 2022. Dari pengamatan ini didapatkan rincian data sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengamatan Indikator 1

(P1) Apakah mengetahui adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut?

Wilayah	Orang /Sampel	Jawaban		Indikasi		Persentase	
		Mengetahui	Tidak Efektif	Tidak Efektif	Efektif	Efektif	Tidak Efektif
A	1		√		√		
	2	√		√			
	3		√		√	20%	80%
	4		√		√		
	5		√		√		
B	1		√		√		
	2		√		√		
	3		√		√	0%	100%
	4		√		√		
	5		√		√		
C	1		√		√		
	2	√		√			
	3	√		√		40%	60%
	4		√		√		
	5		√		√		

Pada wilayah A dengan sampel responden 5 orang dengan indikator pengetahuan masyarakat terhadap adanya regulasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut, didapatkan hasil responden dengan 4 orang yang tidak mengetahui dan 1 orang yang mengetahui adanya regulasi tersebut. Sehingga didapatkan persentase efektif 20% dan tidak efektif 80%.

Selanjutnya pada wilayah B, didapatkan persentase efektif 0% dan tidak efektif 100%, karena dari semua sampel responden tidak mengetahui adanya regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pada wilayah C, didapatkan 2 orang dari 5 sampel responden yang mengetahui adanya regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga didapatkan persentase efektif 40% dan tidak efektif 60%.

Tabel 2. Hasil Pengamatan Indikator 2

(P2) Apakah kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut terlaksana?

Wilayah	Orang /Sampel	Jawaban		Indikasi	Persentase	
		Terlaksana	Tidak Terlaksana		Efektif	Tidak Efektif
A	1			√	√	
	2	√		√	√	
	3	√		√	√	
	4	√		√	√	
	5	√		√	√	
B	1			√	√	
	2			√	√	
	3			√	√	
	4			√	√	
	5			√	√	
C	1			√	√	
	2	√		√	√	
	3	√		√	√	
	4		√	√	√	
	5		√	√	√	

Pada indikator 2, dari aspek pelaksanaan regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut di desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, didapatkan hasil di mana pada wilayah A 0% efektif dan 100% tidak efektif, dengan indikasi bahwa dari 5 responden, 4 di antaranya menyatakan tidak

terlaksananya regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan 1 responden tidak mengetahui.

Pada wilayah B, 4 responden tidak mengetahui dan 1 responden menyatakan tidak terlaksana, sehingga didapatkan persentase efektif 0% dan 100% tidak efektif. Pada wilayah C, 2 responden menyatakan telah terlaksananya regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga didapatkan persentase efektif 40% dan 3 responden tidak mengetahui dengan persentase tidak efektif 60%.

Tabel 3. Hasil Pengamatan Indikator 3

(P3) Apakah ada dampak positif kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut?

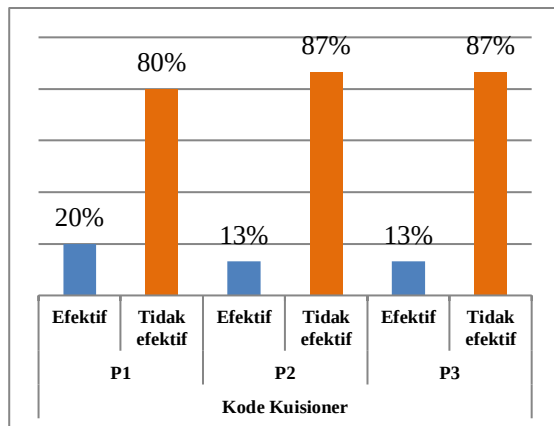
Wilayah	Orang /Sampel	Jawaban		Indikasi	Persentase	
		Ada	Tidak ada		Efektif	Tidak Efektif
A	1			√	√	
	2		√	√	√	
	3		√	√	√	
	4		√	√	√	
	5		√	√	√	
B	1		√	√	√	
	2		√	√	√	
	3		√	√	√	
	4		√	√	√	
	5		√	√	√	
C	1		√	√	√	
	2	√		√	√	
	3	√		√	√	
	4		√	√	√	
	5		√	√	√	

Dengan mengajukan pertanyaan 3 (Kode P3) pada responden, maka didapatkan persentase efektif 0% dan tidak efektif 100% pada wilayah A, dengan asumsi 1 responden tidak mengetahui dan 4 responden menyatakan tidak ada dampak yang dirasakan dari regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada wilayah B, didapatkan persentase efektif 0% dan tidak efektif 100% dari 1 responden yang menyatakan tidak ada dampak dan 4 responden tidak mengetahui. Wilayah C menunjukkan

persentase efektif 40% dengan 2 responden menyatakan ada dampak dari regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Desa Tanjung Seloka dan 60% tidak efektif dari 3 responden yang menyatakan tidak mengetahui.

Dari indikator yang telah diamati maka didapatkan kesimpulan data sebagai berikut:



Grafik 1. Kesimpulan Data Indikator

Data tersebut menunjukkan persentase efektif/tidak efektif untuk indikator P1 adalah 20% efektif dan 80% tidak efektif, indikator P1 13% efektif dan 87% tidak efektif, indikator P3 dengan 13% efektif dan 87% tidak efektif. Yang secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat efektif jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat tidak efektif dari implementasi regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, mengacu pada 3 indikator yang diterapkan saat pengamatan di lapangan.

Namun untuk menentukan efektivitas atau hipotesis (H_0) dapat diterima atau tidak, maka H_0 perlu diuji dengan metode uji hipotesis yang mengacu pada tarap nyata 0,01 agar dapat menyimpulkan telah efektif atau tidaknya regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hubungannya dengan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

KESIMPULAN

Hasil pengamatan menunjukkan keadaan di mana masyarakat Desa Tanjung Seloka tidak banyak – atau hampir tidak mengetahui keberadaan regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan masyarakat desa Tanjung Seloka secara umum.

Data-data pengamatan yang menunjukkan sebagian banyak sampel responden tidak mengetahui keberadaan regulasi ini menjadi faktor kuat yang mempengaruhi hasil perhitungan data, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa tidak atau belum efektifnya regulasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut terimplementasi di Desa Tanjung Seloka (H_0 ditolak), Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Perlu adanya peran aktif pemerintah, yang dipangku oleh pemerintah tingkat desa dan kabupaten untuk memberikan sosialisasi secara lebih *intens* kepada masyarakat desa Tanjung Seloka, agar masyarakat desa Tanjung Seloka mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lengkap terhadap regulasi-regulasi pemerintah yang berlaku bagi pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, dkk. (2019). Analisis Resiko Produksi dan Pendapatan pada Usaha Budidaya Tambak Udang Windu di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 14, 125-134.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmiati, dkk. (2020). Analysis of Shoreline Change in West Coast Area of Tanah Laut District South

- Kalimantan. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 12, 211-222.
- Data Base Peraturan. *JDIH BPK Republik Indonesia*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Dwi Noer, A.A., dkk. (2021). Strategi Pengembangan Hutan Mangrove di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Hutan Tropis*, 9, 88-93.
- Hanna, S. (1999). Strengthening Governance of Ocean Fishery Resources. *Journal of Ecological Economics*, 31, 275-286.
- Kalalo, P.F. (2016). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Wilayah Pesisir*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada.
- Kildow, Judith T. et all. 2009. *State of the U.S. Ocean and Coastal Economies 2009*, United State: National Ocean Economic Program.
- Kusumaatmadja, M. (1983). *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Mattiro, S, dkk. (2021). Potensi Ekowisata Pesisir Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7, 220-225.
- Nurhayati, S.Q. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Karimunjawa. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9, 240-259.